

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyusunan Laporan Keuangan adalah salah satu kegiatan dari proses akuntansi yang lazimnya dilakukan pada akhir suatu periode (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan). Laporan ini seharusnya menunjukkan dengan benar posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. (Himawan dan Zaenal: 2006: 85).

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Prinsip Akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta segala keterangan yang dimuat dalam lampiran- lampirannya antara lain Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Era seperti saat ini, makin banyak perusahaan baru yang menimbulkan ketatnya persaingan dunia usaha, khususnya di bidang konstruksi. Keadaan ini menuntut perusahaan untuk membuat suatu pembeda dengan perusahaan lain yang memproduksi barang-barang sejenis agar dapat mendorong kenaikan penjualan.

Penjualan sebagai salah aktivitas utama dalam suatu perusahaan, memerlukan perlakuan khusus karena dengan bertambahnya angka penjualan baik tunai maupun kredit suatu perusahaan, maka akan bertambah pula aktiva lain perusahaan berupa kas maupun piutang. Menurut Mulyadi (2002: 87), piutang

merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Mulyadi (2001:95) juga menyebutkan, untuk menghindari tidak tertagihnya piutang tersebut, setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit.

Mengenai piutang sendiri, biasanya mendapat perhatian lebih dari manajemen. Hal ini dikarenakan didalam piutang ada resiko yang melekat yaitu piutang macet yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga untuk mengelola sistem piutang perlu dibentuk suatu sistem yang memadai.

Menurut Romney dan Steinbert (2006: 4), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dewasa ini produk bank semakin beraneka ragam. Salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh bank adalah dengan mengeluarkan sistem pembayaran dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC local, adalah instrument yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*), atas permintaan *Applicant* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *Beneficiary* apabila *Issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai

dengan syarat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. ([www.bank\\_mandiri.co.id:diunggah](http://www.bank_mandiri.co.id:diunggah) 2017).

Penerapan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri di Indonesia terbilang cukup baru. Standar yang mengatur penerapan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri pun baru dibuat pada tahun 2013 yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PBI/2013 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *Readymix Concrete* (Beton Jadi). PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya telah lama menjalin kerjasama dengan berbagai kontraktor dan telah cukup berperan dalam membantu pembangunan di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, seringkali PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya terlibat kontrak dengan nominal yang cukup besar dan sistem pembayarannya kredit. Mengingat nominal yang cukup besar tersebut, PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya sebagai penjual membutuhkan jaminan pembayaran dari para pelanggannya. Salah satu sistem yang digunakan adalah dengan sistem pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Hal ini cukup menarik perhatian penulis mengingat penerapan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri belum terlalu banyak di Indonesia dan penulis ingin mengetahui tentang peranan penerapan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ini terhadap piutang perusahaan. Sistem Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani penjualan kredit dan pengelolaan piutang. Oleh karena itu, penulis berencana mengambil judul **“EVALUASI SISTEM PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) PADA PT WIJAYA KARYA BETON, Tbk SURABAYA** sebagai bahan skripsi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah peranan penerapan sistem pembayaran dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) terhadap pengendalian piutang perusahaan?
2. Apakah penerapan sistem Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya telah berjalan secara efektif?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan penerapan sistem pembayaran dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) terhadap pengendalian piutang perusahaan.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di PT Wijaya Karya Beton Tbk Surabaya telah berjalan secara efektif.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis adalah manfaat dari segi akademik dan praktisi sebagai berikut.

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya berkaitan dengan akuntansi pada perusahaan manufaktur..

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Sebagai bentuk pengembangan dari pengetahuan yang diperolehnya yang dimana berfokus pada sistem akuntansi dan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem akuntansi khususnya pada perusahaan manufaktur yang belum didapatkan.

3. Aspek praktis

Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebelum dan saat menerapkan sistem penjualan dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).